



Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kelurahan Guntung Manggis

Alnaya Zahwa¹, Dewi Merdayanty², Junaidy³

¹ Uniska MAB Banjarmasin, Indonesia; zahwaalnaya10@e-mail.com

² Uniska MAB Banjarmasin, Indonesia; dewimerdayanty2021@gmail.com

³ Uniska MAB Banjarmasin, Indoensia; inas.macal@gmail.com

Received: 16/11/2022

Revised: 30/12/2022

Accepted: 11/02/2023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. LPM merupakan lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung aspirasi masyarakat serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan sehingga diperlukan peran aktif LPM dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Ketua LPM, pengurus LPM, aparat kelurahan, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian mengacu pada teori Jim Ife yang meliputi peran LPM sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran LPM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah kelurahan dan LPM dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.

Keywords

Peran; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); Partisipasi Masyarakat; Perencanaan Pembangunan

Corresponding Author

Alnaya Zahwa

Uniska MAB Banjarmasin, Indonesia; zahwaalnaya10@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kelurahan. LPM berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat yang membantu pemerintah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, mendorong prakarsa dan



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Published By World Publishing Journal

swadaya masyarakat, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Peran tersebut menempatkan LPM sebagai salah satu penghubung penting antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif.

Secara normatif, peran LPM diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Peraturan tersebut menegaskan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum selalu berjalan secara optimal. Rendahnya kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), terbatasnya penyampaian ide dan usulan, serta dominannya peran pemerintah dalam menentukan arah pembangunan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara konsep pembangunan partisipatif dengan kondisi di lapangan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan informasi, tingkat pendidikan, kepercayaan masyarakat, maupun belum optimalnya lembaga yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, LPM dituntut mampu menjalankan perannya sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Sebagai fasilitator, LPM berperan menjembatani penyampaian aspirasi masyarakat; sebagai mediator, LPM menghubungkan kepentingan masyarakat dengan pemerintah kelurahan; sedangkan sebagai motivator, LPM mendorong kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Efektivitas ketiga peran tersebut menjadi penting karena keberhasilan pembangunan partisipatif tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memperoleh ruang dan dorongan untuk terlibat dalam proses perencanaan.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Kelurahan Guntung Manggis, di mana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih menunjukkan indikasi belum optimal. Hal ini antara lain terlihat dari rendahnya kehadiran masyarakat dalam Musrenbang, terbatasnya kontribusi ide atau usulan pembangunan, serta masih kuatnya peran aparat dalam menentukan arah pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai sejauh mana LPM menjalankan perannya dalam mendorong partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Penelitian mengenai peran LPM penting dilakukan karena keterlibatan masyarakat merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat lokal. Kajian ini tidak hanya dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan fungsi LPM sebagai fasilitator, mediator, dan motivator, tetapi juga mengidentifikasi faktor penghambat serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kelurahan dan LPM.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan di Kelurahan Guntung Manggis, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat, serta menganalisis upaya LPM dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada peran LPM sebagai fasilitator, mediator, dan motivator, bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan di Kelurahan Guntung Manggis. Penelitian berfokus pada peran LPM sebagai fasilitator, mediator, dan motivator, bentuk partisipasi masyarakat, serta faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat.

Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, keterlibatan, dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Informan terdiri atas Ketua LPM Kelurahan Guntung Manggis sebagai informan kunci, lurah atau aparat kelurahan sebagai informan utama, serta tokoh masyarakat dan ketua RT/RW sebagai informan pendukung.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan perencanaan pembangunan dan keterlibatan masyarakat, khususnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen kegiatan Musrenbang, struktur organisasi LPM, notulen atau hasil musyawarah, daftar hadir, dan foto

kegiatan. Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang komprehensif sekaligus mendukung triangulasi data.

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian, dengan pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi sebagai instrumen pendukung. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan berdasarkan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antartemuan. Selanjutnya, kesimpulan ditarik dan diverifikasi secara terus-menerus dengan membandingkan berbagai sumber data hingga diperoleh temuan yang kredibel mengenai peran LPM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan di Kelurahan Guntung Manggis.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Penelitian mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan di Kelurahan Guntung Manggis dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informasi diperoleh dari Ketua dan Pengurus LPM, aparat kelurahan, Ketua RT, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM telah menjalankan perannya sebagai fasilitator, mediator, dan motivator dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama belum meratanya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai fungsi LPM.

3.1 Peran LPM sebagai Fasilitator

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM Kelurahan Guntung Manggis telah menjalankan perannya sebagai fasilitator melalui penghimpunan aspirasi masyarakat, penyediaan ruang partisipasi, penyampaian informasi mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta pendampingan dalam penyusunan usulan pembangunan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua dan Pengurus LPM, aspirasi masyarakat dihimpun melalui Ketua RT, pertemuan warga, maupun penyampaian langsung kepada pengurus LPM. Usulan tersebut kemudian dikumpulkan dan dibahas bersama Pemerintah Kelurahan dalam forum Musrenbang untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran.

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan Ketua RT yang menyatakan bahwa koordinasi dengan LPM berjalan baik dalam menghimpun dan menyampaikan usulan masyarakat. Dari sisi masyarakat, LPM dinilai cukup terbuka dalam menerima masukan mengenai kebutuhan lingkungan, seperti perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan, dan fasilitas umum. Dokumentasi kegiatan Musrenbang dan daftar hadir juga menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum seluruh masyarakat berpartisipasi secara aktif dan tidak semua usulan dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran serta penentuan skala prioritas. Dengan demikian, peran LPM sebagai fasilitator telah berjalan cukup baik, tetapi masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan pelibatan masyarakat secara lebih merata.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep Jim Ife bahwa fasilitator berperan menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan arah pembangunan. Dalam konteks penelitian ini, LPM tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menyediakan ruang dan mekanisme agar aspirasi tersebut dapat disampaikan melalui proses perencanaan pembangunan.

3.2 Peran LPM sebagai Mediator

LPM juga menjalankan fungsi sebagai mediator dengan menjembatani komunikasi antara masyarakat, Ketua RT, dan Pemerintah Kelurahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa usulan masyarakat yang dihimpun melalui Ketua RT maupun secara langsung kepada LPM selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah dan dibahas dalam Musrenbang.

Ketua LPM dan Pengurus LPM menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan dipertimbangkan dalam penentuan prioritas pembangunan. Ketua RT juga mengungkapkan bahwa LPM membantu memperlancar penyampaian kebutuhan masyarakat kepada Pemerintah Kelurahan. Sementara itu, masyarakat menilai keberadaan LPM mempermudah mereka dalam menyampaikan aspirasi serta memperoleh informasi mengenai perkembangan usulan pembangunan.

Peran mediator juga terlihat ketika terdapat perbedaan antara banyaknya usulan masyarakat dengan kemampuan anggaran pemerintah. Dalam kondisi tersebut, LPM membantu menjelaskan mekanisme penentuan prioritas pembangunan dan mendorong penyelesaian melalui musyawarah. Dengan demikian, LPM tidak hanya bertindak sebagai penyampai aspirasi, tetapi juga membantu menyelaraskan kepentingan masyarakat dan pemerintah.

Temuan ini sesuai dengan konsep Jim Ife yang menempatkan mediator sebagai pihak yang menghubungkan berbagai kepentingan, membangun komunikasi, dan mendorong

penyelesaian perbedaan melalui proses musyawarah. Peran tersebut berkontribusi terhadap terciptanya hubungan yang lebih komunikatif antara masyarakat dan Pemerintah Kelurahan dalam perencanaan pembangunan.

3.3 Peran LPM sebagai Motivator

Sebagai motivator, LPM berupaya meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai Musrenbang, ajakan kepada masyarakat untuk menghadiri forum perencanaan, serta dorongan agar masyarakat menyampaikan ide, saran, dan kebutuhan pembangunan.

Ketua dan Pengurus LPM menjelaskan bahwa komunikasi dilakukan melalui Ketua RT, pertemuan masyarakat, maupun pendekatan langsung kepada warga. Ketua RT juga berperan membantu menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Dari sisi masyarakat, upaya tersebut dinilai membantu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Namun, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Sebagian warga masih belum aktif mengikuti Musrenbang karena kesibukan pekerjaan, keterbatasan informasi, maupun kurangnya pemahaman mengenai pentingnya partisipasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi motivator telah berjalan, tetapi perlu dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan konsep Jim Ife bahwa motivator berperan membangun kesadaran, semangat, dan kemauan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Dalam penelitian ini, upaya LPM dalam memberikan informasi, ajakan, dan pemahaman telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterlibatan masyarakat, meskipun belum menjangkau seluruh warga secara optimal.

3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran LPM didukung oleh beberapa faktor, yaitu kerja sama antara LPM dan Pemerintah Kelurahan, koordinasi dengan Ketua RT dan tokoh masyarakat, serta adanya dukungan dan antusiasme sebagian masyarakat. Kerja sama tersebut mempermudah proses penghimpunan aspirasi, penyampaian informasi, pelaksanaan Musrenbang, dan penentuan prioritas pembangunan.

Selain faktor pendukung, terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu belum optimalnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, kesibukan sebagian masyarakat, serta kurangnya pemahaman mengenai fungsi LPM. Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan dalam waktu yang sama, sedangkan

rendahnya pemahaman sebagian masyarakat menyebabkan keterlibatan dalam Musrenbang belum merata.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, LPM melakukan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan dan Ketua RT, memberikan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat, serta melakukan komunikasi secara langsung dengan warga. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

3.5 Temuan Utama Penelitian

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM Kelurahan Guntung Manggis telah menjalankan tiga peran utama dalam perencanaan pembangunan partisipatif, yaitu sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Sebagai fasilitator, LPM menghimpun dan memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat melalui Musrenbang. Sebagai mediator, LPM menjembatani komunikasi dan kepentingan masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan. Sebagai motivator, LPM mendorong masyarakat untuk hadir, menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam proses pembangunan.

Meskipun ketiga peran tersebut telah berjalan, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat masyarakat yang kurang aktif, keterbatasan anggaran, dan kurangnya pemahaman mengenai fungsi LPM. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, koordinasi, dan komunikasi antara LPM, pemerintah, serta masyarakat diperlukan agar partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat semakin merata dan berkelanjutan.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Peran LPM adalah menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan menghimpun aspirasi masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan, memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam menyusun usulan pembangunan.

Sedangkan Peran LPM sebagai Mediator adalah menjalankan fungsi sebagai mediator dengan menjembatani komunikasi antara masyarakat dan Pemerintah Kelurahan. Seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Ketua RT disampaikan kepada pemerintah dalam forum

Musrenbang sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar penyusunan program pembangunan. Selain itu, LPM juga berperan dalam membangun koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan, Ketua RT, tokoh masyarakat, serta masyarakat sehingga proses perencanaan pembangunan dapat berlangsung secara terbuka, demokratis, dan partisipatif.

Dan Peran LPM sebagai Motivator adalah melaksanakan perannya sebagai motivator dengan memberikan dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Motivasi dilakukan melalui sosialisasi mengenai pentingnya pembangunan partisipatif, penyampaian informasi tentang Musrenbang, ajakan kepada masyarakat untuk hadir dalam forum perencanaan pembangunan, serta pemberian pemahaman bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

- 2) Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Lembaga Pemberdayaan Kelurahan Guntung Manggis adalah, Pelaksanaan peran LPM dalam perencanaan pembangunan partisipatif didukung oleh adanya kerja sama yang baik antara LPM, Pemerintah Kelurahan, Ketua RT, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Adapun faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, keterbatasan anggaran pembangunan, kesibukan masyarakat yang menyebabkan tidak seluruh warga dapat mengikuti Musrenbang, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran LPM. Meskipun demikian, LPM terus berupaya mengatasi hambatan tersebut melalui peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan komunikasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan.
- 3) Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Guntung Manggis dalam mendukung perencanaan pembangunan partisipatif adalah dengan menghimpun aspirasi masyarakat melalui Ketua RT, pertemuan warga, serta forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). LPM juga melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Pemerintah Kelurahan, Ketua RT, dan tokoh masyarakat untuk menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, LPM berupaya memberikan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta mengajak masyarakat untuk aktif menghadiri Musrenbang dan menyampaikan usulan pembangunan.

LPM juga membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui pendekatan secara langsung maupun melalui perangkat RT sehingga masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi, saran, dan kebutuhan pembangunan. Dalam proses perencanaan, LPM berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan Pemerintah Kelurahan agar setiap usulan dapat dibahas secara bersama-sama. Selain itu, LPM terus mendorong masyarakat untuk

berpartisipasi tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan serta pengawasan hasil pembangunan sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan.

REFERENCES

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. (2018). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ife, Jim. (2017). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Isbandi Rukminto Adi. (2018). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardikanto, Totok & Soebiato, Poerwoko. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johny. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Adet, D. S., Fitryah, N., & Situmorang, L. (2023). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. *EJournal Pembangunan Sosial*, 1, 46-59.
- Ananda, Rizki. (2020). *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 120–130.
- Arnstein, Sherry R. (2019). *A Ladder of Citizen Participation*. *Journal of the American Planning Association*, 85(1), 24–34.
- Aziz, F., & Irmawati, I. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep). *Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, 1(2).
- Cohen, John M., & Uphoff, Norman T. (2017). *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity*. *World Development*, 45(2), 213–235.
- Fauzi, Ahmad. (2021). *Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat*. *Jurnal*

Ilmu Sosial dan Politik, 9(1), 45–56.

Gunawan, J. H., & Zubaidah, E. (2024). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kampung Tualang Kecamatan Tualangkabupaten Siak. *Journal of Public Administration Review*, 1(2), 868-881.

Nurhalizah, Siti. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang*. Jurnal Pembangunan Daerah, 4(1), 55–67.

Sartika, Dewi. (2022). *Peran LPM dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan di Tingkat Kelurahan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(2), 88–99.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dokumen/Lembaga

Bappenas. (2019). *Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.